

TINJAUAN HISTORIS TERHADAP KEPPRES NO. 24 TAHUN 2016 TENTANG HARI LAHIR PANCASILA

I Gusti Ngurah Santika¹

^a Universitas Dwijendra

Email: ngurahsantika88@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan historis terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau library research. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila diperjuangkan oleh Megawati Soekarno Putri, PDI-P, dan Taufiq Kiemas sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Peirngatan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila akhirnya berhasil diperjuangkan pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi. Keppres No. 24 Tahun 2016 didasarkan pada pertimbangan, bahwa Ir. Soekarno lah yang pertama kali berpidato mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam Sidang BPUPKI. Sedangkan alasan dan motivasi Presiden Jokowi untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila agar masyarakat mengetahui asal-usul Pancasila, menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam menggali, merumuskan, dan menetapkan Pancasila, menghentikan polemik siapa penggali dan penemu Pancasila, serta melestarikan dan melanggengkan Pancasila melalui pengamalan.

Kata kunci: Tinjauan Kritis, Hari Lahir Pancasila

ABSTRACT

This research aims to conduct a historical review of the Presidential Decree No. 24 of 2016 concerning the Birth of Pancasila. The method used in this research is literature or library research. The results of this research indicated that the determination of June 1st as the Birth of Pancasila has been championed by Megawati Soekarno Putri, PDI-P, and Taufiq Kiemas since the administration of President Susilo Bambang Yudhoyono. The commemoration of June 1st as the Birth of Pancasila was finally successfully fought for during President Jokowi's administration. Presidential Decree No. 24 of 2016 is based on the consideration that Ir. Soekarno was the first to make a speech proposing Pancasila as the basis of the state in the BPUPKI Session. Meanwhile, President Jokowi's reasons and motivation for establishing June 1st as the Birth of Pancasila are so that the public will know the origins of Pancasila, respect the struggle of the nation's founders in exploring, formulating and establishing Pancasila, stopping the polemic of who was the digger and founder of Pancasila, and preserving and preserving Pancasila through practice. .

Keywords: Critical Review, The Birth of Pancasila.

Sejarah Artikel

Diterima : 12-06-2022

Disetujui : 09-08-2022

Kata kunci:

Tinjauan Kritis, Hari Lahir Pancasila

Keywords:

Critical Review, The Birth of Pancasila.

Pendahuluan

1 Juni 2016 menjadi momen berharga yang akan menorehkan/mengukir indahnya kisah perjalanan ideologis bangsa Indonesia di masa depan. Munculnya kekaguman itu bukan karena tanggal tersebut dikenal luas rakyat Indonesia sebagai hari Ir. Soekarno berpidato mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Melainkan lebih tertuju pada tahun itu, yang mengingatkan pada lahirnya sebuah produk hukum monumental, berupa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016. Secara garis besarnya Keppres tersebut memutuskan dan menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan Hari Libur Nasional. Selain itu, Keppres tersebut juga mengajak Pemerintah bersama-sama seluruh komponen bangsa Indonesia untuk memperingati Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni.

Keluarnya penetapan yuridis-formal untuk memperingati Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni melalui Keppres No. 24 Tahun 2016 adalah sebuah lompatan tinggi bagi bangsa Indonesia. Mengingat sebelum diputuskan dan ditetapkan oleh Presiden Jokowi, Hari Lahir Pancasila pernah tenggelam

lebih dari tiga dekade lamanya. Karena mulai 1 Juni 1970 Presiden Soeharto melalui Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) melarang peringatan Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945. Semenjak itu, tidak ada lagi perayaan yang berhubungan dengan Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945. Dan baru pada 1 Juni 2006, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) berani berpidato tentang lahirnya Pancasila di Balai Sidang Jakarta. Pada waktu itu yang terngiyang dan menjadi pertanyaan publik, apakah acara kenegaraan itu dapat dikatakan mengakhiri kontroversi/polemik mengenai Hari Lahir Pancasila?

Barulah dengan lahirnya Keppres No. 24 Tahun 2016 perdebatan menyangkut Hari Lahir Pancasila dapat dituntaskan. Keppres tersebut adalah sikap tegas Pemerintah atas kontroversi Hari Lahir Pancasila. Setelah Keppres tersebut ditanda tangani Presiden Jokowi, tidak akan adu argumentasi sesama anak bangsa mengenai Hari Lahir Pancasila. Dapat dikatakan Keppres yang menetapkan Hari Lahir Pancasila adalah sebuah hadiah paling istimewa atau spesial dari Presiden Jokowi kepada bangsa Indonesia yang amat mencintai ideologinya.

Tak pelak keluarnya penetapan yuridis Hari Lahir Pancasila disambut suka cita dan kebahagiaan oleh seluruh komponen bangsa. Meskipun dalam perkembangannya masih terdengar suara sumbang di sana-sini yang pada intinya kurang menerima keputusan Presiden Jokowi. Jadi selain memanen pujian, Keppres tersebut juga menuai kritikan pedas dari berbagai kalangan. Misalnya saja pakar hukum tata negara Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, menyatakan bahwa Hari Lahir Pancasila sebagai dasar negara adalah 18 Agustus 1945, bukan 1 Juni 1945 seperti yang ditetapkan Presiden Jokowi dalam Keppres No. 24 Tahun 2016. Begitu juga dengan AM Fatwa sebagai anggota DPD menolak keras apabila peringatan Hari Lahir Pancasila dilembagakan.

Terlepas dari polemik yang menyertai dan mengiringi Kepres No. 24 Tahun 2016, sebenarnya telah muncul beberapa persoalan filosofis yang haruslah dijawab secara kritis dari perspektif historis. Misalnya mengenai kisah perjuangan ideologis berbagai elemen bangsa, hingga akhirnya pada tanggal 1 Juni secara definitif diputuskan dan ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Dari tinjauan historis perlu ditelusuri kembali kebenaran, bahwa 1 Juni adalah Hari Lahir Pancasila. Perlu diungkapkan ke publik tentang alasan atau motivasi utama Presiden Jokowi untuk menerbitkan Keppres No. 24 Tahun 2016.

Dengan mengetahui kebenaran historis atas Hari Lahir Pancasila, bangsa Indonesia tidak perlu lagi membuang energinya untuk berdebat, melainkan lebih fokus pada upaya pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat pun memperoleh pemahaman yang holistik dan komperhensif mengenai tujuan luhur yang ingin diwujudkan Presiden Jokowi melalui penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun judul yang diangkat dalam penelitian adalah Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila.

Metode

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau *liberary research* yang teknik pengumpulan datanya menggunakan studi penelahaan terhadap literatur-literatur, buku-buku ilmiah, laporan penelitian yang ada kaitan dengan permasalahan yang di pecahkan (Nuswantari & Rachman, 2020).

Target/Subjek Penelitian

Target/subjek penelitian ini adalah dalam bentuk data penelitian dan publikasi ilmiah yang ada kaitannya dengan Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila.

Prosedur

Karena penelitian ini adalah *liberary research* atau kepustakaan, maka usaha peneliti untuk mengumpulkan/menghimpun informasi yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui buku-buku ilmiah, laporan-laporan penelitian, artikel-artikel ilmiah, tesis, ensiklopedia dan sumber elektronik lainnya. Kemudian peneliti menggunakan metode konten analisis, yaitu teknik untuk membuat referensi yang dapat diteliti ulang dan valid dari data berdasarkan konteks penggunaannya (Novianto & Mustadi, 2015).

Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa pemikiran dan kajian hasil penelitian seputar Hari Lahir Pancasila yang dihimpun dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi yang kemudian dilakukan melalui analisis konten atau *Content Analisis*.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengadopsi dan mengaplikasikan teknik analisis data kualitatif yang diajukan milles & Huberman. Teknik ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Santika, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini lebih mengacu dan mengarah pada permasalahan di atas. Oleh sebab itu, beberapa persoalan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini antara lain: Perjuangan Penetapan Hari Lahir Pancasila; Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016; Alasan dan Motivasi Utama Presiden Jokowi Menerbitkan Keppres No. 24 Tahun 2016.

Perjuangan penetapan 1 Juni Sebagai Hari Lahir Pancasila

Pasca Presiden Soekarno dilengserkan MPR dari jabatannya, peringatan/perayaan Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945 dihentikan oleh Presiden Soeharto melalui Kopkamtib. Terhitung mulai 1 Juni 1970 Presiden Soeharto melarang perayaan Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945. Pembeneran atau justifikasi tindakan Pemerintah pada waktu itu lebih didasarkan kepada kontroversi dan polemik yang berkecamuk di masyarakat. Secara historis, saat itu muncul perdebatan, hangat baik secara akademis maupun sosial-kemasyarakatan terkait siapa sesungguhnya yang pertama kali menyampaikan gagasan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei-1 Juni 1945.

Secara umum, pendapat akademisi dan masyarakat terpolarisasi atau mengkerucut menjadi dua pendapat yang bertentangan. Ada kelompok yang berpandangan, bahwa orang yang pertama kali mengusulkan dan mengajukan Pancasila sebagai dasar negara adalah Ir. Soekarno melalui pidatonya 1 Juni 1945 dihadapan peserta Sidang BPUPKI. Di lain pihak terdapat kelompok masyarakat yang berpendapat, bahwa Mr. Muh. Yamin lah yang untuk pertama kali mengusulkan dan memajukan rumusan yang mirip dengan rumusan Pancasila yang sekarang berlaku. Melalui pidatonya, Mr. Muh. Yamin secara panjang lebar yang disampaikannya pada 29 Mei 1945. Kisruh itu ternyata menjadi dalih manipulatif pemerintah untuk meniadakan dan menghapuskan peringatan atau perayaan Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945.

Ketimbang memperingati Pidato Soekarno 1 Juni 1945, Presiden Soeharto lebih tertarik untuk menyemarakkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Motivasi Presiden Soeharto lebih memilih merayakan Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk mengingatkan rakyat akan kekejaman Partai Komunis Indonesia yang melancarkan kudeta berdarah terhadap pemerintah yang sah. Aksi subversif (pemberontakan) Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah bertujuan mengganti Dasar Negara Pancasila dengan Ideologi Komunis (Santika, 2020). Dengan demikian, di era kepemimpinan Presiden Soeharto, 1 Juni bukan lagi menjadi tanggal istimewa, karena seolah-olah digeser dan digantikan dengan 1 Oktober sebagai tanggal penanda kemenangan Pancasila melawan PKI yang berpaham komunisme.

Runtuhnya oligarki kekuasaan Presiden Soeharto, tidak dengan serta merta mampu menghadirkan secercah harapan baru bagi kebangkitan Pancasila (Santika, 2020). Karena lengsernya Presiden Soeharto dari panggung politik Indonesia bukan berarti vitalitas Pancasila semakin perkasa. Pancasila justru kian lemah dan meredup ditutupi oleh hingar bingar politik. Euforia demokratisasi yang mengusung kebebasan dengan konsep hak asasi di Indonesia tanpa disadari telah menyudutkan Pancasila dari segala arah. Kelamnya masa lalu Pancasila di bawah asuhan Presiden Soeharto telah menggiring dan mengarahkan bangsa ini untuk menafikan kehebatan atau kesaktian ideologinya sendiri. Sebagian masyarakat memandang sinis Pancasila, karena dituding sebagai simbol otoriter Presiden Soeharto. Pancasila di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto secara manipulatif selalu dijadikan stempel kekuasaan (power stamp) untuk menjustifikasi perilakunya yang syarat atau identik dengan pengekangan dan kekerasan politik.

Pasca reformasi bergulir Pancasila harus menanggung beban dan dosa masa lalu yang diperbuat Presiden Soeharto. Pancasila yang pada masa Orde Baru sempat memenuhi hati dan ruang publik, kini tidak lagi mendapat posisi atau kedudukan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Santika, 2017). Pancasila mendadak hilang dari wacana publik. Jangankan merayakan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, hanya sekedar menyebut Pancasila saja, pejabat negara mulai alergi dan amnesia. Berbeda sekali saat Presiden Soeharto belum terjungkir dari panggung kekuasaan, Pancasila selalu dielu-elukan, dipuji-puji, dan diagung-agung pada setiap kegiatan kenegaraan, mimbar politik, orasi ilmiah dan sebagainya. Kini Pancasila sendirian ditinggalkan dalam sebuah lorong sunyi yang jauh dari keramaian (Kartika, 2015)

Memperhatikan kondisi Pancasila yang kurang terurus dan terlantar itu, tidak sedikit tokoh bangsa yang merasa perihatin. Mereka pun tidak tinggal diam, melainkan tergerak hati dan pikirannya untuk mengembalikan kejayaan Pancasila. Memposisikan kembali Pancasila dalam setiap kegiatan seremonial kenegaraan adalah usaha terbaik yang harus dilakukan. Perjuangan untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila adalah prioritas yang harus dicapai. Bahkan peringatan Hari Lahir Pancasila tidak cukup hanya sekedar pengakuan yang bersifat sosiologis-politis. Melainkan pengakuan itu harus dituangkan dalam bentuk yuridis-formal, misalnya saja dengan keputusan Presiden Indonesia.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, baik itu media massa cetak maupun online, tokoh bangsa yang paling getol memperjuangkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila adalah Presiden Kelima Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri bersama kendaraan politik yang didirikannya, yaitu PDI-P. Hal itu sesuai dengan ideologi partai PDI-P yang mengelaborasi ide, gagasan, perjuangan dan cita-cita luhur Ir. Soekarno. Dalam beberapa kesempatannya, tanpa malu-malu Megawati Soekarno Putri dan PDI-P mengutarakan keinginannya untuk memformalisasi 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan Hari Libur Nasional.

Apabila ditelusuri kembali jejak historisnya, terutama di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya sudah muncul usulan agar peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni ditetapkan menjadi hari libur nasional. Dalam berbagai kesempatannya, usulan itu dikumandangkan

oleh PDI-P. Mengingat Hari Lahir Pancasila adalah salah satu tonggak bersejarah yang dipandang sangat monumental bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri begitu getol mengusulkan supaya 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Selain Megawati Soekarno Putri dengan PDI-P, masih terdapat tokoh bangsa lainnya yang ikut memperjuangkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Adalah Taufiq Kiemas, yang saat menjadi Ketua MPR, pernah mengirim surat secara resmi ke Presiden SBY. Dengan tegas, selaku Ketua MPR Taufiq Kiemas meminta Pemerintah untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi SBY dengan alasan banyak pihak yang berkeberatan.

Salah satu tokoh nasional yang merasa keberatan dan menolak keras terkait rencana penetapan Hari Lahir Pancasila adalah AM Fatwa. Protes itu dilayangkannya dengan resmi kepada Presiden SBY. Bahkan surat tersebut mengandung sebuah tekanan politis yaitu ancaman pengerahan masa besar-besaran yang mengatasnamakan Umat Islam. Meskipun Presiden SBY menolak permintaan untuk memutuskan/menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, bukan berarti dapat mematahkan dan menyurutkan perjuangan berbagai pihak. Kemudian melalui kewenangannya, Taufiq Kiemas ketika menjadi Ketua MPR mengadakan peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni. Perayaan tersebut pun lahir dari hasil kompromi politik dari berbagai pihak. Jadi acara seremonial kenegaraan 1 Juni di era Pemerintahan SBY bukan lah bermaksud merayakan Hari Lahir Pancasila, melainkan untuk memperingati dan merayakan pidato lahirnya Pancasila Ir. Soekarno.

Perjuangan tiada lelah berbagai pihak untuk menjadikan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila baru berjalan dengan mulus pada masa Pemerintahan Presiden Jokowi. Walau sebelum keluarnya keputusan Pemerintah secara final, sempat terjadi insiden tarik ulur menyangkut Hari Lahir Pancasila. Untuk meredam polemik yang muncul, Pemerintah pun sudah menjalankan strategi berupa lobi-lobi politik ke berbagai pihak. Namun pada awalnya sempat beredar informasi yang isinya simpang siur bahwa penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila batal dilakukan Pemerintah. Padahal banyak pihak sudah mengetahui, bahwa rancangan ataupun draf penetapan tersebut sudah lama dipersiapkan oleh Pemerintah. Tetapi setelah melalui lika-liku politik yang panjang, Presiden Jokowi dengan penuh keyakinan pada akhirnya mengeluarkan Keppres No. 24 Tahun 2006 tentang Hari Lahir Pancasila.

Sejak keluarnya Keppres No. 24 Tahun 2006 secara yuridis-formal bangsa Indonesia mengakui dan menerima 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Bahkan dalam salah satu ketentuannya Pemerintah mengajak seluruh komponen bangsa bersama-sama merayakan dan memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni. Lebih daripada itu, sebagai bentuk penghormatan paling tinggi maka 1 Juni tidak hanya diputuskan sebagai Hari Lahir Pancasila tetapi juga disertai dengan penetapan sebagai Hari Libur Nasional.

Tinjauan Historis Terhadap Keppres 24 Tahun 2016.

Dapat diprediksi sejak semula, bahwa keluarnya Keppres No. 24 Tahun 2016

siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Siklus ini berlanjut dan akan dihentikan jika sesuai dengan kebutuhan dan dirasa sudah cukup. tentang Hari Lahir Pancasila akan memantik atau memicu kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Meski pada dasarnya banyak pihak yang menyambut keputusan tersebut dengan suka cita. Tetapi tidak sedikit yang merasa kecewa dengan penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Oleh karena itu, Keppres tersebut perlulah ditinjau secara historis apakah dapat diterima dari logika kritis.

Untuk mendapat sebuah kesimpulan yang dapat diterima dan disepakati semua pihak, maka mau tidak mau, penelusuran jejak sejarah perumusan dasar negara mulai dari Sidang BPUPKI (29 Mei-1 Juni) hingga penetapannya pada 18 Agustus 1945 dalam Sidang PPKI harus dilakukan. Tinjauan historis dengan logika kritis akan digunakan sebagai bahan kajian untuk menilai Keppres No. 24 Tahun

2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Pada masa Sidang BPUPKI the founding father mengemukakan pemikiran dan gagasannya tentang dasar negara yang paling cocok bagi Indonesia merdeka. Tiga tokoh bangsa yang tercatat tampil memukau menyampaikan rumusan dasar negara pada periode 29 Mei-1 Juni 1945 adalah Muh. Yamin (29 Mei), Prof. Soepomo (31 Mei), dan Ir. Soekarno (1 Juni). Setelah Muh. Yamin dan Prof. Soepomo menyampaikan pidatonya, maka tibalah giliran Ir. Soekarno yang menutup persidangan BPUPKI dengan ide atau pemikiran dasar negaranya yang hebat (Kartika & Uru, 2019). Rumusan dasar negara Ir. Soekarno yang disampaikan pada 1 Juni 1945, yaitu.

1. Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan;
3. Mufakat atau Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan (Hardianto, 2017).

Oleh Ir. Soekarno rumusan dasar negara itu diberi nama Pancasila. Untuk penamaan Pancasila menurut Ir. Soekarno adalah sesuai dengan petunjuk dan saran yang diberikan salah seorang temannya yang ahli bahasa. Hingga kini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan siapakah gerangan teman Ir. Soekarno yang dimaksud. Banyak pihak menduga, bahwa teman ahli bahasa yang dimaksud adalah Muh. Yamin. Rumusan Pancasila Ir. Soekarno inilah yang diterima BPUPKI untuk digunakan sebagai pedoman dalam membahas dasar negara selanjutnya.

Karena belum mendapat kesepakatan, maka dibentuklah sebuah panitia kecil yang berjumlah sembilan sehingga sangat populer disebut Panitia Sembilan. Menyangkut tugas pokok Panitia Sembilan adalah mencari dan menemukan modus vivendi atas perbedaan dasar negara yang muncul dalam Sidang BPUPKI. Ternyata perbedaan ideologis di BPUPKI merembes dalam Panitia Sembilan. Muncul pandangan berbeda antara golongan Islam dengan golongan nasionalis mengenai hubungan negara dengan agama dalam rumusan dasar negara (Santika, Purnawijaya, et al., 2019). Hasil pergulatan politik antara dua kelompok itu melahirkan sebuah kompromi dalam bentuk Piagam Jakarta yang ditanda tangani pada 22 Juni 1945. Adapun rumusan dasar negara hasil kerja Panitia Sembilan terdiri atas:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum memiliki alat kelengkapan negara. Dasar negara Indonesia merdeka menjadi permasalahan yang krusial saat itu. Bahkan Sidang PPKI sempat tertunda dan molor akibat masih terjadi tarik menarik mengenai dasar negara Indonesia. Sebab rencana PPKI untuk mengesahkan rumusan dasar negara hasil kerja Panitia Sembilan memperoleh penolakan dari masyarakat Indonesia timur. Karena rumusan dasar negara itu dianggap mengistimewakan golongan agama tertentu. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka mereka tidak bersedia bergabung dengan negara yang akan dibentuk. Melihat konflik yang mengancam persatuan di depan mata, lobi-lobi politik terhadap kelompok Islam pun segera dilakukan Moh. Hatta. Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat semangat persatuan yang baru dibangun dalam sebuah negara merdeka. Dengan mengatasnamakan persatuan, Moh. Hatta meminta kelompok Islam legowo dan menerima dengan ikhlas tuntutan masyarakat Indonesia timur. Oleh karena itulah permintaan Moh. Hatta untuk mencoret "dengan kewajiban menjalankan syariat

Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam dasar negara akhirnya diterima dan disepakati kelompok Islam (Santika, Sujana, et al., 2019). Dengan didasari semangat persatuan, PPKI akhirnya berhasil mengesahkan UUD 1945 (Santika, 2019), yang di dalamnya memuat rumusan dasar negara Pancasila. Rumusan dasar negara Pancasila hasil kerja PPKI terdiri atas:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kalau ditinjau dari perspektif historis komparatif dengan pendekatan logika kritis akan tampak jelas, bahwa ”nama” Pancasila sebagai dasar negara memang benar secara resmi lahir pada 1 Juni 1945, sehingga tidak salah jika tanggal tersebut ditetapkan dan diputuskan dalam Keppres No. 24 Tahun 2016 sebagai Hari Lahir Pancasila. Artinya hari lahir yang dimaksud dalam Keppres itu lebih mengacu kepada Pancasila sebagai penamaan. Mengingat apabila ditinjau dari segi isinya, Pancasila yang diusulkan oleh Ir. Soekarno dalam Sidang BPUPKI sebagai dasar negara melalui pidatonya pada 1 Juni 1945 berbeda sekali dengan Pancasila yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945 dan berlaku secara resmi sekarang ini. Belum lagi kalau dilihat dari segi susunan dan rumusan dasar negara Ir. Soekarno yang memposisikan Ketuhanan sebagai sila kelima.

Berarti sejak kelahirannya pada 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Dengan demikian, rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatoken Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara (Sila et al., 2020).

Dapat disimpulkan, bahwa Pancasila yang rumusannya secara utuh berlaku hingga sekarang ini bukanlah usul Ir. Soekarno seorang. Karena sejak pertama kali dipidatoken, rumusan Pancasila banyak mengalami perkembangan yang signifikan. Meskipun memang harus diakui, bahwa Ir. Soekarno berkontribusi dan berjasa besar dalam membidani lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dengan demikian, Hari Lahir Pancasila sebagai dimaksud Keppres No. 24 Tahun 2016 adalah lebih tertuju dari segi penamaannya yang pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Soekarno melalui pidatonya dalam Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.

Alasan Dan Motivasi Presiden Jokowi Menerbitkan Keppres No. 24 Tahun 2016.

Untuk mengetahui alasan dan motivasi Presiden Jokowi 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dapat dicermati pada bagian pertimbangan Keppres No. 24 Tahun 2016. Pada bagian butir a dinyatakan, bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal-usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestariannya dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menarik sekali untuk dipahami bagian kalimat dalam pertimbangan Keppres itu. Karena di dalamnya memuat kalimat harus diketahui asal-usul Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan asal-usul dalam pertimbangan Keppres tersebut. Dalam Kamus Besar, kata asal-usul berarti:

1. Asal keturunan: silsilah; susur galur (arti)

Contoh:

Kalau dilihat dari-nya, dia masih keturunan Raja Mataram;

2. Cerita (secara urut dari awal sampai terjadinya suatu peristiwa); riwayat; (arti)
3. Yang menjadi sebab-sebabnya (tentang suatu peristiwa atau kejadian); sebab mulanya; (arti).
4. Silsilah: urutan keturunan; asal mula; (arti).

Jadi asal-usul yang dimaksud dalam pertimbangan Keppres No. 24 Tahun 2016 lebih mengarah kepada rangkaian peristiwa historis yang mengisahkan perjuangan luhur the founding father dalam menggali, merumuskan, dan menetapkan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Melalui Keppres itu, Presiden Jokowi secara tidak langsung ingin mengajak bangsa Indonesia mengerti dan memahami secara utuh tentang Hari Lahir Pancasila dengan jalan mengikuti alur sejarah perumusan Pancasila secara urut mulai dari Sidang BPUPKI, Panitia Kecil (Panitia Sembilan) hingga ditetapkan PPKI sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan menyelami dan mendalami kisah perjalanan tokoh bangsa dalam menggali, merumuskan, dan menetapkan dasar negara mulai dari 29 Mei 1945 sampai 18 Agustus 1945 secara holistik, rakyat Indonesia akan mengetahui asal-usul kelahiran Pancasila sebenarnya.

Asal-usul kelahiran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia harus dipelihara dan diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Mereka harus mengetahui bagaimana beratnya tantangan; hambatan; yang dilalui pendiri bangsa dalam menggali, merumuskan, dan menetapkan Pancasila sebagai fondasi sekaligus neraca kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Santika, 2018). Dengan mengetahui sejarah asal-usul dasar negara dan ideologi, paling tidak tumbuh sebuah harapan baru, bahwa generasi muda akan merasa memiliki dan lebih menghargai Pancasila sebagai titik kulminasi perjuangan luhur the founding father dalam mendirikan negara.

Disamping itu pengetahuan mendalam menyangkut asal-usul Pancasila, setidaknya mampu menghindarkan generasi muda dari perdebatan dan pertentangan ideologi secara konseptual. Dengan pemahaman yang baik terhadap asal-usulnya, generasi muda akan jauh lebih mudah dalam melestarikan dan melanggengkan Pancasila melalui aktualisasi di kehidupannya. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara tidak mungkin bertahan apabila terus-menerus diposisikan sebagai sumber konflik. Dengan keluarnya Keppres No. 24 Tahun 2016 sudah saatnya Pancasila diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena hanya dengan pengamalan, Pancasila dapat lestari dan langgeng. Akan tetapi keinginan untuk mengamalkan Pancasila barulah muncul bila generasi muda benar-benar memiliki modal pengetahuan menyangkut asal-usul/identitas ideologinya tersebut.

Terbitnya Keppres No. 24 Tahun 2016 menandakan Presiden Jokowi menghendaki bangsa Indonesia keluar dan terbebas dari perdebatan ideologis, terutama menyangkut asal-usul Pancasila. Dengan begitu di masa depan bangsa Indonesia tidak perlu lagi membuang-buang waktu (wasting time) untuk mempersoalkan kapan dan siapa yang melahirkan Pancasila, melainkan lebih berfokus pada upaya implementasi dan aktualisasinya di lapangan kenegaraan. Karena dengan pengamalannya dalam kehidupan bernegara, Pancasila akan membudaya melalui perilaku generasi penerus bangsa. Dengan demikian, dapat dipastikan Pancasila akan tetap lestari dan langgeng sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia.

Simpulan

Perayaan pidato lahirnya Pancasila pernah diperingati dan dirayakan pada masa Soekarno dilarang di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan dalih terjadi kontroversi siapa yang pertama kali mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam Sidang BPUPKI. Pasca reformasi, terutama di era Pemerintahan SBY, muncul usulan dari berbagai pihak supaya 1 Juni diperingati

sebagai Hari Lahir Pancasila. Tidak kurang dari Megawati Soekarno Putri, PDI-P, dan Taufiq Kiemas yang meminta Presiden SBY untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Sayang sekali permintaan tersebut ditolak Presiden SBY dengan alasan banyak yang menentanginya.

Barulah di bawah Presiden Jokowi, perjuangan berbagai pihak supaya 1 Juni diputuskan dan ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila berhasil diwujudkan. Walau sudah dapat dipastikan, bahwa keputusan Presiden Jokowi tersebut akan melahirkan dan menuai kontroversi di masyarakat. Jika ditinjau dalam perspektif historis komparatif dengan menggunakan logika kritis, maka Keppres No. 24 Tahun 2016, menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila tidaklah keliru. Apalagi Keppres tersebut berpatokan pada pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945 yang untuk pertama kali mengusulkan "nama" Pancasila sebagai dasar negara Indonesia di Sidang BPUPKI. Keppres tersebut menilai Pidato Ir. Soekarno memiliki andil yang sangat besar pada saat perumusan dan penetapan Pancasila, baik dalam Panitia Sembilan maupun PPKI.

Beberapa alasan dan motivasi utama Presiden Jokowi untuk menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila supaya bangsa Indonesia mengetahui asal-usul Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Sehingga generasi penerus bangsa mampu menghargai beratnya perjuangan Soekarno beserta the founding father lainnya dalam menggali, merumuskan, dan menetapkan Pancasila. Di samping itu, Presiden Jokowi menghendaki Keppres ini mampu menghentikan polemik yang berkembang di masyarakat mengenai asal-usul Pancasila. Karena aktualisasi atau pengamalan adalah jalan untuk melestarikan dan melanggengkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui penelitian ini adalah perlu adanya pengungkapan motif politik dibalik lahirnya Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. Karena dengan ketahuinya motif politik di balik keluarnya penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, rakyat Indonesia dapat menilai lebih obyektif lagi apakah keputusan yang dibuat Presiden Jokowi melalui Keppres No. 24 Tahun 2016 sudah tepat atau keliru. Meningat penelitian ini hanyalah tinjauan historis yang lebih didasarkan pada logika kritis.

Referensi

- Hardinanto, A. (2017). Autentisitas Sumber Sejarah Pancasila Dalam Masa Sidang Pertama Badan Untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. *Veritas et Justitia*, 3(1), 43–64. <https://doi.org/10.25123>
- Kartika, I. M. (2015). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Politik Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FIKP Universitas Dwijwandra*, 4(1). <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/444>
- Kartika, I. M., & Uru, Y. B. (2019). Hardinanto, A. (2017). Autentisitas Sumber Sejarah Pancasila Dalam Masa Sidang Pertama Badan Untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. *Veritas et Justitia*, 3(1), 43–64. <https://doi.org/10.25123>
- Kartika, I. M. (2015). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Politik Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FIKP Universitas Dwijwandra*, 4(1). <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/444>
- Kartika, I. M., & Uru, Y. B. (2019). Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kegiatan Berorganisasi Di Sma Dwijendra Denpasar Tahun Pelajaran 2017/2018. *SEMINAR NASIONAL 1 HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN Singaraja*, 5 Oktober 2019, 174–184.

- Novianto, A., & Mustadi, A. (2015). Analisis Buku Teks Muatan Tematik Integratif, Scientific Approach, Dan Authentic Assessment Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 45(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/jk.v45i1.7181>
- Nuswantari, & Rachman, Y. F. (2020). Penguatan Pancasila Sebagai The Living Ideology Melalui Revitalisasi Pembelajaran Pancasila Di Era Disrupsi. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 109–119. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship>
- Santika, I. G. N. (2017). Kepala Sekolah Dalam Konsep Kepemimpinan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Widya Accarya*, 7 (1). <http://103.39.12.42/index.php/widyaaccarya/article/view/898>
- Santika, I. G. N. (2018). Memperkuat Pancasila Melalui Pergub No. 79 Tahun 2018 Dalam Menanggulangi Pengikisan Budaya Di Era Revolusi Industri 4.0. *Eminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali*, 79, 981–990.
- Santika, I. G. N. (2018b). Strategi Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Desa Padangsambian Kaja Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Kepedulian Lingkungan Untuk Membebaskannya Dari Bencana Banjir. *Widya Accarya*, 9 (1).
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan / Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5 (1), 23–34. <http://dx.doi.org/10.23887/jiis.v5i1.18777>
- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6 (1), 26–36. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.25001>
- Santika, I. G. N. (2020). Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. *Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1 (1), 74–85. <https://e-proceeding.undiksha.ac.id/index.php/semnashk/article/view/1665>
- Santika, I. G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *Journal of Etika Demokrasi (JED)*, 4 (2), 89–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jed.v4i2.2391>
- Sila, I. M., Purana, I. M., & Awa, A. R. B. (2020). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Purung Ta Kadonga Ratu Pada Masyarakat Desa Makatakeri Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Widya Accarya*, 11 (1), 84–96.